



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	11 (sebelas)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang.
Hari, Tanggal	:	Kamis, 25 Agustus 2022
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal., M.B.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021.
Hadir	:	1. 39 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), saudara Kukuh S Achmad; 3. Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), saudara Ukay Karyadi; 4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), saudara Muhammad Rudi; 5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang), saudara Junaidi. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang pada pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 25 Agustus 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal., M.B.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan mengapresiasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) selama 5 (*Lima*) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan agar Badan Standardisasi Nasional (BSN) mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas Realisasi Anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp 190.949.727.409,- (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah*) atau 98,84% dari Total Pagu Anggaran serta mendorong Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan kinerja, capaian realisasi anggaran tahun 2022 dan realisasi standardisasi nasional Tahun 2022.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan mengapresiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) selama 10 (*Sepuluh*) tahun berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 dan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas Realisasi Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp 136.467.729.454,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) atau 96,59% dari Total Pagu Anggaran serta mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk meningkatkan kinerja, capaian realisasi anggaran tahun 2022 dan realisasi pengawasan persaingan usaha Tahun 2022.
5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dan mengapresiasi Badan Pengusahaan (BP) Batam atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) selama 6 (*Enam*) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan agar Badan Pengusahaan (BP) Batam mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

6. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam atas Realisasi Anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp 2.029.179.073.622,- (*Dua Triliun Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) atau 82,82% dari Total Pagu Anggaran serta mendorong Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk meningkatkan kinerja dan capaian realisasi anggaran tahun 2022.
7. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dan mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) selama 6 (*Enam*) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan agar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
8. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang atas Realisasi Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp 69.720.093.213,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*) atau 91,10% dari Total Pagu Anggaran serta mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang untuk meningkatkan kinerja dan capaian realisasi anggaran tahun 2022.
9. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan (BP) Batam Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.16 WIB.

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(BSN)**

Ttd.

KUKUH S ACHMAD

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A
A-103**

**KEPALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU)**

Ttd.

UKAY KARYADI., S.E., M.E

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(BP BATAM)**

Ttd.

MUHAMMAD RUDI

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS SABANG)**

Ttd.

JUNAIDI